



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,  
BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,  
DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Jenis rapat : Rapat Kerja  
Rapat ke :  
Sifat Rapat : Terbuka  
Dengan : Menteri Kesehatan RI  
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Februari 2015  
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai  
Acara : Pembicaraan Pendahuluan Program/Kegiatan  
Kementerian Kesehatan pada RAPBN-P Tahun  
2015.  
Ketua Rapat : Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX  
DPR RI;  
Sekretaris Rapat : Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi  
IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara  
1, Lantai 1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir : A. orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya;

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.55 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa Kementerian Kesehatan RI mendapatkan APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp47.758.757.903.000 (*Empat puluh tujuh trilyun tujuh ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*). Sesuai Surat Menteri Keuangan No S-876/MK.02/2014, Kementerian Kesehatan RI mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp3.518.524.581.000 (*Tiga trilyun lima ratus delapan belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), sehingga RAPBN-P Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp51.277.282.484.000 (*Lima puluh satu trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
2. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kesehatan RI untuk mensinergikan kemitraan yang lebih intensif untuk mewujudkan anggaran kesehatan 5% dari APBN sebagai amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk membuat simulasi perluasan PBI pada program KIS dan pemisahan anggaran PBI dari anggaran Kementerian Kesehatan. Simulasi disampaikan ke Komisi IX DPR RI sebelum Komisi IX DPR RI melakukan pendalaman program dalam RAPBN-P Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan para Eselon I.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan pada tanggal 24 September 2014 bahwa Kementerian Kesehatan RI menyetujui untuk mengalokasikan program Tugas Pembantuan dan program daerah lainnya sesuai dengan prioritas program pembangunan kesehatan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan representasi anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.

Rapat diakhiri pukul 16.05 WIB.

Menteri Kesehatan RI,



Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K)

Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si

A-380